



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

PUSAT KAJIAN BAHASA DAN BUDAYA

Center for Studies on Language and Culture
Gedung Santo Fransiskus Asisi (K2), Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia
Tel : +62 21 570 3306 ext. 213, 571 9560
Fax : +62 21 571 9560
Website : <http://www.atmajaya.ac.id>
E-mail : pkbb@atmajaya.ac.id

12 Maret 2014

No.: 017/III/PKBB- PM.10.05/03/2014

Hal: Undangan sebagai Narasumber diskusi kebudayaan

Kepada
Yth. Dr. Gregorius Budi Subanar, SJ.
Program Studi Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma

Dengan hormat,

Pusat Kajian Bahasa dan Budaya (PKBB) Unika Atma Jaya, Jakarta secara resmi mengundang Bapak menjadi narasumber dalam diskusi *panel budaya* yang mengangkat tema *Berterus Terang dalam Berperilaku di Indonesia* yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan KOLITA 12 pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 14 April 2014
Waktu : 09:00 s.d. 12:00
Tempat : Hall B
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta

Bila ada materi yang perlu digandakan, mohon kesediaan Bapak mengirimkan *softcopy* kepada kami sebelum Jumat, 11 April 2014 ke email pkbb@atmajaya.ac.id atau reginayanti@yahoo.com agar dapat kami gandakan sebelum tanggal penyelenggaraan.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.



Sopan (tidak) santun dalam (Budaya) Komunikasi Politik Potret Parodi di Indonesia

1. Kisah Kekerasan: Pekerjaan Rumah negeri kita

Satu dekade yang lalu, ada tuntutan dialog kultural yang diserukan dari wilayah Maluku. Ini disampaikan mengingat akibat dari agenda pembangunan telah merusakkan sendi-sendi identitas kultural yang ada di berbagai daerah di Indonesia Timur yang nota bene kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Maluku telah menjadi korban kekerasan. Kecuali Maluku, cukup banyak kasus kekerasan muncul di Indonesia Timur yang kaya dengan Sumber Daya Alam. Seperti, Poso, Sambas, Kupang, Luwu di Sulawesi Selatan. Masing-masing daerah memiliki varian khusus atas terjadinya kekerasan. Untuk Maluku, segregasi muncul akibat dari peristiwa kekerasan yang dipicu oleh varian agama dan varian ideologi. Harapan dialog kultural ditempatkan untuk menjembatani varian agama dan ideologi untuk bisa mengolah dasar 'kemalukuan' sebagai faktor integratifnya.¹ Terkait dengan harapan ini, pemerintah pusat ditempatkan sebagai inisiator sekaligus mediator yang bertanggung jawab. Kendati pun, berbagai usaha ditempuh untuk menjalankan hal tersebut justru datang dari pihak lain yang berfungsi memediasinya.² Di mana pemerintah (pusat) menempatkan dirinya?

Satu dekade kemudian seruan dialog kembali diserukan dari Papua. Papua sebagai bagian wilayah Indonesia Timur telah mengalami peristiwa yang sama seperti halnya yang diserukan orang-orang Maluku. Seruan dialog dari Papua juga didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat yang tidak mengakomodasi aspirasi dari masyarakat setempat.³ Berbagai tanggapan muncul atas seruan dialog tersebut.⁴ Sebuah penelitian komprehensif yang dilakukan oleh LIPI mengusulkan beberapa agenda sebagai jalan keluarnya.⁵

Problem kekerasan di daerah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat menjadi akan berderet-deret manakala diperlihatkan masalah-masalah yang berlangsung di ujung-ujung wilayah Indonesia yang lain. Berbagai hasil penelitian memperlihatkan bagaimana masalah di ujung-ujung wilayah Indonesia mengemuka.

Pengalaman kekerasan (fisik) yang berlangsung di Indonesia Timur berbeda dengan pengalaman kekerasan yang terjadi di tempat lain. Wilayah-wilayah yang kaya Sumber Daya Alam telah menghadirkan berbagai pihak luar, para pemegang modal untuk maksud menguasai atas sumber daya

¹ Hasbollah Toisuta, "Belajar dari kasus Aceh. Menggagas dialog kultural", Abidin Wakano, "Perjumpaan identitas local dengan hegemoni politik uniformisme oleh negara; sebuah kecurigaan khermeneutik", dalam: Fahmi Salatalohy dan Rio Pelu (ed.), *Nasionalisme Kaum Pnggiran*, Yogyakarta, LKIS, 2003, hal. 3-12, 13-25

² P.M. Laksono (ed.), *Ken Sa Fak*

³ Neles Tebay, *Dialog Jakarta-Papua. Sebuah perspektif Papua*, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 2009

⁴ Elga J Sarapung (ed.), *100 Orang Indonesia Angkat Pena demi Dialog Papua*, Yogyakarta, Interfidei, 2013

⁵ Pusat Penelitian Politik Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, "Papua Road Map. Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future", (2008)

alam. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan, dengan mendatangkan berbagai unsur masyarakat dari luar daerah. Akhirnya wilayah Indonesia Timur banyak dihindangi masalah kekerasan dan rentan terhadap berbagai isu serupa.

Dalam sebuah pendekatan atas keragaman terkait dengan kekerasan, relasi politik merupakan wilayah yang rentan atas terjadinya kekerasan. Hannah Arendt memperlihatkan bagaimana kekerasan akan menular pada masyarakat karena kebanalan berpikir.⁶ Kebuntuan komunikasi dalam wilayah tersebut dicerahkan bagaimana kajian memori sosial dapat membongkar bentuk-bentuk resistensi dari trauma sosial yang ada.

2. *Keterusterangan pemerintah vs ke(tidak)terus-terangan masyarakat*

Penanganan dan penyelesaian atas berbagai ketegangan dan kekerasan akan terkait dengan keterbukaan dan perilaku etis (kesopanan terkait di dalamnya).⁷ Masalah kekerasan yang menjadi pekerjaan rumah juga hadir dalam bentuk kekerasan simbolik yang berlangsung dalam relasi komunikasi antara pihak pemerintah dan masyarakatnya. Yang dikemukakan berikut adalah pengalaman Yogyakarta dalam berhadapan dengan kebijakan yang mau diterapkan oleh pemerintah pusat terkait keistimewaan Yogyakarta. Sejak awal kemerdekaan RI, pemerintahan propinsi DIY memiliki keistimewaan di mana kepala daerah merupakan bagian pewarisan dari dua kerajaan (kasultanan dan pakualaman). Sistem pemilihan kepala daerah yang diusulkan pemerintah pusat dilawan oleh masyarakat Yogyakarta yang tetap menghendaki adanya penetapan dalam pemilihan kepala daerah. Bagaimana masyarakat Yogyakarta berjuang berhadapan rencana kebijakan pemerintah pusat? Bagaimana keterus-terangan pemerintah pusat dilawan dengan permainan simbolik (ketidak terus terang) masyarakat.

Upaya pemerintah dilakukan secara prosedural dengan mendatangkan berbagai delegasi. Baik dari parlemen pusat, birokrasi kementerian Dalam Negeri dari tingkat asisten menteri, sampai menteri dalam negeri sendiri. Bahkan tidak kurang Presiden sendiri, pernah mengungkapkan rumusan yang dapat menjebak, "monarki (di Indonesia) itu adanya di dalam ketoprak". Rencana pemerintah tersebut merupakan bentuk hegemoni, penguasaan yang dilakukan secara koersif melalui berbagai salurannya. Diungkapkan secara terus terang melalui delegasinya, dan dengan atau melalui bahasa ungkapan bersayap sebagaimana dikatakan Presiden SBY.

Masyarakat Yogyakarta melakukan perlawanan atas hal tersebut. Sudah sejak awal pernyataan sikap pemerintah langsung ditanggapi oleh masyarakat. Jawab yang dilakukan dengan dua cara, cara terus terang dan tidak terus terang. Demonstrasi sebagai cara terus terang dilakukan secara langsung. Keterus terangan warga masyarakat Yogyakarta ditempuh dengan cara hadir di dalam Sidang Pleno DPRD. Pendiannya satu, tidak menerima Rencana kebijakan yang diajukan pemerintah pusat. DPRD sebagai wakil rakyat tingkat propinsi, akhirnya mendukung penetapan. Artinya melawan rencana kebijakan pemerintah. Ada sebuah cara elegan yang dilakukan, bahkan kemudian memberi kekuatan pada

⁶ Karya-karya Hannah Arendt telah diperkenalkan dalam literatur bahasa Indonesia, antara lain oleh Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press, 2004

⁷ Ingo W Schroder and Bettina E Schmidt, "Violent imaginaries and violent practices", dalam Bettina E Schmidt and Ingo W Schroder, *Anthropology of Violence and Conflict*, London and New York, Routledge, 2001, hal. 1-24

parlemen daerah. Digelar sidang paripurna secara terbuka. Suasana segar yang diisi dengan berbagai orasi.

Upaya menyuarkan perlawanan yang dilakukan dengan cara simbolik dilakukan dalam berbagai kesempatan. Sejumlah peristiwa dikemukakan berikut ini.

a. **Pengibaran bendera kraton** - Bendera kasultanan dan kadipaten dalam sejarahnya merupakan simbol kekuasaan kasultanan dan kadipaten dalam wilayah yang ada dalam naungan dan lingkup kekuasaannya. Praktik pemasangan dan pengibaran bendera sudah tidak pernah dilakukan. Dalam peristiwa di atas, masyarakat mengklaim wilayah yang dipasang bendera kraton sebagai bagian dari kasultanan dan kadipaten Adikarto. Dalam ruang publik tersebut, masyarakat menciptakan medan/ arena langsung membawa pada situasi yang dihadapkan dengan kekuasaan pemerintah pusat.

Wilayah kekuasaan yang biasanya dipasang Bendera (Merah Putih) sebagai simbol kekuasaan dan keberadaan negara dilawan dengan pengibaran bendera keraton yang dipasang dan menjangkau sejumlah daerah Propinsi DIY. Arena pertarungan atas kebijakan pemerintah telah mencapai dan menjangkau berbagai pihak di pelosok. Perlawanan (secara simbolik) langsung dibangun dari sana. Masyarakat setempat disentuh dan dilibatkan. Ekspresinya, sejumlah wilayah pinggir langsung ditanami tiang-tiang bendera. Ini dimungkinkan karena ada kumpulan kepala desa terlibat dalam kelompok masyarakat yang melawan rencana kebijakan pemerintah pusat tersebut.

b. **Pembuatan paspor** – Perlawanan dalam wilayah lain hadir melalui perangkat teknologi informasi. Dengan sarana tersebut wilayah yang dijadikan arena tidak dibatasi oleh wilayah geografis. Simbol yang digunakan dapat menjangkau lintas batas negara. Memanfaatkan hal tersebut, ada anggota masyarakat yang mengunggah foto fisik paspor negara Ngajogjakarta hadiningrat. Ruang publik yang tercipta dalam hal ini diisi dengan menempatkan perangkat identitas dari sebuah negara yang ruang lingkungannya menjangkau dunia internasional (karena menjadi syarat administratif yang melampaui batas negara). Dengan pemunculan paspor Ngajogjakarta Hadiningrat, Yogyakarta dihadirkan sebagai sebuah negara baru. Kedaulatan di tangan rakyat. Bahkan pemerintah pusat tak mampu mengontrol pemunculan 'negara baru' melalui penciptaan simbol tersebut.

c. **Aksi duduk di halaman** – Dalam lingkungan masyarakat, kaum intelektual memiliki kedudukan khusus. Berhadapan dengan pihak tersebut, masyarakat memperlihatkan bahasanya tersendiri. Di tengah suasana tersebut, mantan rektor sebuah Perguruan Tinggi menuduh sebuah kelompok tertentu sebagai bagian dari kelompok komunis.⁸ Penyebutan 'kelompok komunis' menempatkan sebuah stigma yang selama ini merupakan bagian dari praktik rejim Orde Baru. Pihak yang dituju pun memberikan perlawanan. Kepada siapa mereka berhadapan ada cara pembacaan khusus sehingga pemilihan ekspresinya sangat diperhitungkan.

Mengunjungi halaman rumah seseorang mantan rektor Perguruan Tinggi berarti masuk wilayah (hak) pribadi seseorang. Hal tersebut dilakukan orang-orang untuk melakukan demo. Membungkus bentuk demo tersebut, upaya yang dilakukan para demonstran adalah memilih memakai pakaian daerah.

⁸ Wawancara dengan seorang aktivis yang terlibat dalam gerakan massa Kawula Ngajogjakarta.

Dengan pakaian *surjan* – kelompok demonstran menempatkan diri di bawah kekuasaan sultan/ abdi dalem. Mereka memilih untuk berlindung di bawah kekuasaan sultan dan mengkritisi sikap yang diambil oleh mantan Rektor tersebut. Mereka melakukan aksi duduk di halaman rumah, seperti halnya perilaku sopan di tempat yang menjadi milik orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Simbol-simbol yang dipilih, digunakan untuk menutupi/ memperhalus aksi demo yang mereka lakukan.

Aksi-aksi ‘pengibaran bendera’, ‘penciptaan paspor’ dan ‘duduk di halaman’ adalah ekspresi sikap perlawanan dari masyarakat. Perlawanan tersebut muncul berhadapan dengan kebijakan pemerintah, atau sikap tertentu dari kaum intelektual yang menggunakan mekanisme pemberian stigma. Masyarakat Indonesia telah terbiasa berhadapan dengan berbagai peraturan yang secara inkonsisten tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang mempunyai kuasa. Selama ini masyarakat tidak memperlihatkan bentuk konfrontasi langsung dalam perlawanannya. Dalam peristiwa-peristiwa di atas, ada kesempatan yang terbuka dalam konflik vertikal. Pilihan pengibaran bendera, penciptaan paspor, atau aksi duduk langsung terkait dengan perlawanan mereka (kendati tidak dalam arti langsung berhadapan secara fisik) dengan kekuasaan itu. Ada arena, ada pelaku, ada bahasa.

3. *Ke(tidak)terusterangan lewat gambar*

Representasi pemerintah hadir dalam para personil birokrasinya. Dalam masa kampanye lalu, sejumlah birokrat terlibat dalam kampanye pemilu untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Bagaimana keterusterangan diungkapkan oleh seorang birokrat yang sekaligus politikus (menjadi pengurus partai) melalui iklan politiknya?

Sebuah gambar iklan kampanye muncul dalam koran lokal Yogyakarta *Kedaulatan Rakyat* edisi 17 Maret 2014. Pada halaman 1 (satu) menampilkan sebuah iklan khusus. Sepasang suami isteri, keduanya memohon doa restu atas pencalonan pasangan tersebut untuk menjadi anggota parlemen mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain iklan surat kabar, gambar pasangan tersebut juga hadir pada banner-banner yang dipasang di berbagai sudut kota.

Untuk Si Suami, KRMT Roy Suryo kata-kata yang digunakan adalah rumusan kata santun “Nyuwun Pangestu”, mohon doa restu. Sebuah ekspresi (literer) terkait kesopanan. Serta beberapa informasi yang menyertai, terkait dengan beberapa hal: logo dan no partai (PD no 7), semboyan yang menunjukkan komitmennya. “Terus tingkatkan kesejahteraan rakyat”, “Beri bukti bukan janji”, “Asli Yogya Istimewa tanpa rekayasa”. Dan di samping potret dirinya, ada foto SBY sebagai Ketua DPP Partai Demokrat. Untuk Sang Istri, selain foto diri yang menebar senyum dalam kebaya lengkap⁹, ada informasi nama diri (dicantumkan pula nama alias yang menunjuk pada nama suami, seorang menteri yang berkuasa). Juga informasi status calon, “Calon DPD RI Dapil Yogyakarta”. Satu semboyannya “ASLI Jogja Istimewa Tanpa Rekayasa”. Ekspresi kesopanan yang terpampang adalah “Nyuwun Pangestu”. Sebuah ekspresi kesopanan yang sama dari ekspresi suaminya.

⁹ Penggunaan foto dengan kebaya ternyata merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat KPU. Pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (bawaslu). Wawancara dengan saksi pelapor atas pelanggaran tersebut.

Ekspresi pasangan suami isteri tersebut mengungkapkan sopan santun, “Nyuwun Pangestu”, mohon doa restu.¹⁰ Dalam sebuah kerangka keadaban publik, perilakunya, dapat dipertanyakan, apakah dapat diklasifikasikan sebagai orang yang tahu atau tidak tahu adat? Bagaimana mungkin dua orang dari bawah satu atap, dari satu ranjang secara bersama mencalonkan diri untuk menjadi wakil dari 240 juta rakyat Indonesia. Padahal yang bersangkutan adalah seorang fungsionaris partai berkuasa (politikus). Dia juga menjabat sebagai seorang menteri pada kabinet saat ini (birokrat). Bagaimana mungkin pasangan suami isteri secara bersama-sama mencalonkan diri untuk mewakili rakyat sebagai anggota parlemen? Dan keduanya secara bersama-sama mohon doa restu kepada publik. Secara singkat, di balik ekspresi kesopanan tersebut justru menyimpan masalah kesantunan yang mencederai masyarakat. Iklan tersebut mengekspresikan mohon dukungan suara dengan menempatkan kekuasaan (pimpinan partai yang notabene presiden RI yang berkuasa, atau suami yang tengah menjabat menteri untuk Kabinet RI saat ini) sebagai alat yang melegitimasi tindakannya. Hal demikian tidak jauh dari masalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) merupakan bagian dari sejarah Orde Baru yang menimbulkan krisis multi dimensi sehingga berakhirnya rejim penguasa yang telah bercokol selama 32 tahun.

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berlangsung karena terjadi pencampuradukan ruang privat dan ruang publik. Membuat batas keduanya menjadi kabur dan bercampur baur. Sebuah peristiwa muncul dalam masa kampanye yang lalu. Salah satu logo dan motto yang dipakai oleh Partai Demokrasi adalah “rumah kita”. Dalam kampanye yang dilakukan SBY, orang di sekitar panggung memegang logo dengan motto tersebut. Ada sejumlah pertimbangan istilah “rumah kita” dipakai. Istilah tersebut telah terbiasa, akrab di telinga karena menjadi potongan syair lagu yang digemari masyarakat. “Rumah kita” istilah yang puitik, dan memberi gambaran situasi idaman. “Rumah kita” mengatasi konflik. Sekaligus, dalam “rumah kita” berlangsung peristiwa yang mengaburkan pemisahan ruang privat dan publik. Ruang privat hubungan dalam keluarga suami istri, anak, adik ipar dibawa dalam ruang publik (politik) kekuasaan. Ketika patron menggunakan logika tersebut, klien - si anak buah ternyata menggunakan pola serupa. Kasus KRMT Roy Suryo yang dikemukakan di atas, jelas memperlihatkan hal tersebut.

Ke(tidak)terusterangan lewat gambar dapat terus kita elaborasi dalam berbagai peristiwa lain. Berita gambar dalam beberapa koran yang menyertai berita tentang penunjukan Jokowi sebagai Calon Presiden RI oleh Ketua PDIP menampilkan beberapa *gestur*. *Kompas* menampilkan *gestur* Jokowi yang tengah mencium bendera Merah Putih. Demikian halnya, *Kedaulatan Rakyat* koran di Yogyakarta menampilkan *gestur* yang sama. *Jakarta Post* menampilkan *gestur* yang lain, yakni Jokowi yang tengah mencium tangan Megawati. Berita yang menyertai foto-foto tersebut lebih terkait dengan news, informasi. Melalui gambar, Jokowi sebagai tokoh fenomenal dan populer dengan gaya blusukannya, dalam *gesturnya* -untuk pembaca (nasional) *Kompas* dan pembaca (lokal) *Kedaulatan Rakyat*-menyambut penunjukan tersebut sebagai mandat untuk melakukan tindakan yang terkait dengan perjuangan tanah air (beserta penduduknya). Ada harapan yang ditempatkan pada konsistensi kebijakan dan tindakan yang berorientasi pada publik yang dilayaninya.

¹⁰ Dapat dibandingkan dengan seorang mempelai yang setelah melaksanakan akad nikah, menyelenggarakan resepsi untuk mohon doa restu.

Sedangkan, *Jakarta Post* menunjukkan kepada pembaca (internasional) sebuah gestur yang mengetengahkan teka-teki, bagaimana mandat kepemimpinan yang akan diembannya, dalam relasi kuasanya antara Jokowi dan Megawati Sukarnoputri yang memberi mandat kepadanya. Sebuah catatan dalam majalah *Tempo* menyertai peristiwa penunjukan tersebut menyatakan, “....”.

Ini merupakan satu catatan yang memperlihatkan keberanian bersikap dengan orientasi nilai. Ya, orientasi nilai menjadi hal yang penting dalam perkara menilai sopan santun (dalam *gestur*, maupun ungkapan verbal, dan literer). Dan keterus-terangan bukan (lagi) perkara tabu.

Situasi semacam dapat dideret-deret untuk berbagai daerah lain dengan kasus-kasus serupa. Misal, kasus di Banten. Barangkali ada kasus-kasus serupa belum terbongkar. Praktek dinasti menempatkan sebuah catatan Lord Acton, “power tend to corrupt”

4. *Perlawanan yang Mengemuka*

Tatkala berbagai poduk dari budaya pop menjadi kendaraan bagi birokrasi pemerintah (“Hari gini tidak bayar pajak, apa kata dunia”), partai politik (penguasa) sekaligus kontestan pemilu – “rumah kita”, pada wilayah yang sama perlawanan dinyatakan. Sebuah perlawanan yang dilakukan untuk menggugat sekaligus berorientasi pada nilai tertentu yang diperjuangkan. Orientasi nilai terkait dengan keyakinan pada hirarki nilai yang menjadi pedoman dan cara bertindak (seseorang). Berbagai ahli dari bermacam disiplin akan menempatkan bagaimana hirarki nilai akan dibangun.¹¹

Apakah ke(tidak)terusterangan terkait dengan hal-hal ini? Tentu saja. Dalam penelusuran artefak dunia pop industri musik, suasana yang ditunjuk di atas sampai pada pernyataan sikap dapat dilihat dari sejumlah lirik lagu. Dibangun dari hal yang memperlihatkan situasi ambivalensi sampai dengan pernyataan sikap melawan. Sebelum masa Reformasi, lagu-lagu Iwan Fals dengan kritik sosialnya sudah memperlihatkan gairah yang menunjuk berbagai masalah dalam kaitannya dengan ketimpangan, ambivalensi dan kebutuhan pembaruan. Mulai dari nasib “Guru Umar Bakri”, lagu “Bento”, dan “Bongkar”.

Di samping musik dari industri besar, juga muncul dalam berbagai lagu lain dari indie label dan yang bersifat lokal. Lagu Jawa “Rewel” *Ngene salah ngono salah. Piye-piye sarwo salah* (Begini salah, begitu salah. Semua serba salah. ...). Kelompok musik Armada Racun melantunkan, “*Kita berbahasa satu bahasa Amerika, ...* “. Sampai yang terbaru Encik Sri Krishna, “Ayo Lawan”. Dalam lagu-lagu tersebut tak ada teriak histeris turut mewarnai pada sikap perlawanannya. Apa yang dapat dikonstruksikan dari hal-hal di atas?

5. *Belajar Berdemokrasi*

Dalam upaya membangun masyarakat komunikatif, Habermas mengemukakan pemikiran terkait perspektip relasi komunikasi. Sekaligus menempatkan etika yang dibutuhkan dalam menciptakan

¹¹ Dalam teori psikologi Abraham Maslov punya teori hirarki nilai. L. Kohlberg juga mempunyai teori tingkat perkembangan moral berdasar orientasi nilai. Filsafat moral utilitarian, moral rasional akan mempunyai penjelasannya sendiri. Bagaimana di dalam budaya-budaya setempat?

kesetaraan.¹² Demikian pun, kajian media memiliki kompleksitas dan mekanisme tersendiri di dalam memanfaatkan ruang publik yang tercipta.¹³

Dalam buku *Indonesia Mencari Demokrasi*, Mochtar Buchori memperlihatkan berbagai keruwetan masalah di Indonesia mulai dari menjelaskan istilah involusi.¹⁴ Yang ditunjuk adalah involusi budaya di mana berlangsung proses budaya yang membuat kita tidak berdaya. Situasi tersebut disebabkan oleh proses berpikir yang terkait tentang nilai, tentang norma yang ambivalen (karena mempunyai tataran nilai yang sama, tapi kita tidak memilih) yang melibatkan kita, dan menenggelamkan kita dalam situasi yang membingungkan. Terhadap situasi tersebut, sebenarnya ada hirarki nilai yang menempatkan tingkat-tingkatan yang membuat kita untuk memilih berdasar orientasi nilai yang kita yakini dan dijadikan pegangan. Dalam proses tersebut, adakah *moral courage*, suatu keberanian yang bersifat rasional terlahir dari keberhasilan memahami dan menghadapi persoalan secara rasional? Bagaimana keadaan ini akan berlangsung jika keadaan semakin diperparah karena orang takut berpikir.¹⁵ Apakah kriteria tingginya pendidikan bagi calon legislatif menjamin kemampuan berpikir yang mampu menempatkan kesantunan publik berhadapan dengan masyarakat yang diwakilinya. Atau justru dengan kepandaiannya berusaha mengelabui masyarakatnya. Dan ternyata masyarakat mampu mencermati serta memberikan perlawanan atas ke(tidak)terusterangan para pejabat publik.

Dr. G Budi Subanar
Staf Pengajar Program Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

¹² F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif. Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 2009

¹³ John Thompson, "Social Theory, Mass Communication and Public Life" dalam ... hal. 24-37

¹⁴ involusi sudah mulai dari *agriculture involution* dari Teori Booke. Dia memperlihatkan bagaimana pembagian waris yang tidak memungkinkan bagi petani untuk survive.

¹⁵ Tatkala orang menawar untuk sedikit kurang jujur, sedikit kurang benar, sedikit boros. Selanjutnya akan terjadi kebohongan besar-besaran, penyelewengan besar-besaran, pemborosan besar-besaran. Mochtar Buchori, *"Indonesia Mencari Demokrasi"*, Yogyakarta, Insist Press, 2005, hal. 11 dst.